

Mewujudkan Desa Mandiri: FGD Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Realizing Independent Villages: FGD Data Collection on Village Community Institutions

Sunaryono Sunaryono

Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia, Pontianak

*Korespondensi penulis : sunaryono@ibe.ac.id

Article History:

Received: 30 April 2024

Revised: 21 Mei 2024

Accepted: 30 Juni 2024

Keywords:

Village Self-Reliance, Data Collection, Community Organizations, Focus Group Discussion (FGD), Rural Development

Abstract: The realization of self-reliant villages is a crucial pillar in fostering prosperous and competitive communities amid rapid development. Accurate and comprehensive data management of village community organizations (Lembaga Kemasyarakatan Desa, LKD) is essential for informed decision-making, meticulous planning, and effective program implementation. This article discusses the role of Focus Group Discussions (FGDs) in enhancing LKD data collection processes. FGDs serve as an effective method to gather in-depth information and diverse perspectives from stakeholders, facilitating the identification of needs and challenges, formulation of effective data collection strategies, and fostering commitment and collaboration among participants. The outcomes of these FGDs include more accurate and relevant data, enhanced human resource capacities, and improved village self-reliance. This approach underscores the importance of collective effort and strategic planning in achieving genuine village autonomy, leveraging the spirit of cooperation and collaboration to build resilient and thriving communities.

Abstrak

Mewujudkan desa mandiri merupakan pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing di tengah perkembangan yang pesat. Pengelolaan data yang akurat dan komprehensif dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan program yang efektif. Artikel ini membahas peran Focus Group Discussion (FGD) dalam meningkatkan proses pendataan LKD. FGD menjadi metode yang efektif untuk menggali informasi mendalam dan perspektif beragam dari pemangku kepentingan, memfasilitasi identifikasi kebutuhan dan tantangan, perumusan strategi pendataan yang efektif, serta membangun komitmen dan kolaborasi di antara peserta. Hasil dari FGD ini meliputi data yang lebih akurat dan relevan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kemandirian desa yang lebih baik. Pendekatan ini menekankan pentingnya upaya kolektif dan perencanaan strategis dalam mencapai kemandirian desa yang hakiki, memanfaatkan semangat gotong royong dan kolaborasi untuk membangun masyarakat yang tangguh dan sejahtera.

Kata Kunci: Kemandirian Desa, Pendataan, Lembaga Kemasyarakatan, Focus Group Discussion (FGD), Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

Lembaga kemasyarakatan desa memegang peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki fungsi yang beragam, mulai dari pengelolaan dana desa hingga menampung serta menyuarakan aspirasi masyarakat desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa, masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran vital dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa guna mencegah

* Sunaryono Sunaryono, sunaryono@ibe.ac.id

penyalahgunaan kekuasaan (Riyatna & Gayatri, 2021). Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa dianggap krusial karena masyarakat desa memiliki pemahaman yang lebih baik terkait potensi dan permasalahan yang ada di desa (Riyatna & Gayatri, 2021).

Selain itu, lembaga kemasyarakatan desa juga berperan dalam mengawasi alokasi dana desa, seperti yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan dana desa di tingkat desa (Haipon & Watu, 2021). Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kunci dalam mendorong kemajuan pemerintahan desa (Muhtar et al., 2022). Melalui peningkatan kapasitas aparat desa dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan, diharapkan proses pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan secara signifikan (Muhtar et al., 2022).

Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Mereka dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam membangun basis sosial ekonomi lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Ahmad et al., 2019). Dengan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan lebih optimal, sehingga hasil kerjanya dapat lebih maksimal (Kaiyo & Mina, 2018). Didalam PP Nomor 47 Tahun 2015 sudah disebutkan harus tercipta desa yang mandiri dan LKD, BUMDes merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki peran untuk mendukung desa menjadi desa mandiri (Sunaryono S, Salahuddin & Dilla, 2019) (Sunaryono et al., 2022).

Dalam konteks pembangunan pedesaan, konsep pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan pengurangan kemiskinan dan praktik berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan dapat secara signifikan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (Khan, 2017). Selain itu, inisiatif seperti Program Dana Desa di Indonesia telah menunjukkan efektivitas strategi yang ditargetkan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam mempromosikan pembangunan pedesaan (Permatasari et al., 2021). Investasi negara juga ditemukan memiliki korelasi langsung dengan pemberdayaan pedesaan, menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan (Ganjipour et al., 2020).

Dalam keseluruhan konteks ini, lembaga kemasyarakatan desa menjadi ujung tombak dalam menjembatani antara pemerintah desa, masyarakat desa, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan peran yang strategis ini, lembaga kemasyarakatan desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pembangunan desa berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

METODE

Dalam penelitian "Mewujudkan Desa Mandiri: FGD Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa," metodologi yang digunakan melibatkan pendekatan penelitian tindakan partisipatif dengan kombinasi metode kualitatif seperti FGD dan wawancara semi-struktur (Islam & Inan, 2021). Penelitian ini juga akan melakukan tinjauan pustaka sistematis untuk memahami praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha milik desa serta mengumpulkan data empiris melalui survei dan teknik pengumpulan data lainnya. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal juga akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan proyek pemberdayaan desa.

Metodologi penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran modal sosial dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi (Mahato et al., 2022), serta menyoroti pentingnya jaringan sosial dalam mendorong perubahan positif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan.

HASIL

Kegiatan FGD Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa bertujuan untuk memberdayakan komunitas pedesaan melalui pendekatan partisipatif. Pemberdayaan di lingkungan pedesaan telah terbukti menghasilkan hasil positif bagi individu dan organisasi (Amundsen & Martinsen, 2015). Strategi seperti telemedisin dan pemanfaatan penyedia layanan kesehatan gigi tingkat menengah telah efektif dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil (Estai et al., 2016). Selain itu, peran TIK, seperti telecentre, sangat penting dalam memberdayakan komunitas pedesaan, terutama perempuan, dengan menyediakan akses ke informasi dan layanan (Alao et al., 2017).

Hasil kegiatan FGD yang dilaksanakan di Hotel Harris Pontianak menunjukkan bahwa partisipasi aktif komunitas lokal merupakan kunci utama dalam pemberdayaan desa. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari beberapa desa yang ada di provinsi Kalimantan Barat dan perwakilan dari beberapa kelurahan yang ada di kota Pontianak dan kota Singkawang, termasuk perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan anggota lembaga kemasyarakatan desa. Partisipasi yang tinggi menunjukkan antusiasme dan komitmen komunitas untuk terlibat dalam proses pemberdayaan desa, yang memperkaya diskusi dan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan desa.



Gambar 1. Kegiatan FGD Lembaga Kemasyarakatan Desa

Melalui diskusi yang intensif, teridentifikasi bahwa lembaga-lembaga seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dan Kelompok Tani memainkan peran vital dalam berbagai aspek kehidupan desa. Karang Taruna aktif dalam mengembangkan potensi pemuda, PKK berfokus pada kesejahteraan keluarga, LPM memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan Kelompok Tani meningkatkan produktivitas pertanian. Keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di desa-desa tersebut.



Gambar 2. Penyampaian Pengantar kegiatan FGD LKD

Hasil pemetaan juga mengungkapkan kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan infrastruktur yang memadai. Peserta FGD mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan, penyediaan akses terhadap modal usaha dan teknologi pertanian, serta

peningkatan infrastruktur desa. Selain itu, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang terampil, kurangnya kerjasama antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, serta kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan untuk pengembangan desa.

Pentingnya pendataan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) juga menjadi sorotan utama dalam FGD ini. Pendataan yang akurat dan terperinci tentang LKD sangat diperlukan untuk memahami kapasitas dan potensi setiap lembaga dalam mendukung pembangunan desa. Dengan data yang komprehensif, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penguatan kapasitas melalui pelatihan rutin, fasilitasi akses ke sumber daya, peningkatan kolaborasi antara lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait, serta pengembangan infrastruktur dasar. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam merumuskan kebijakan serta program untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan desa-desa di sekitar Pontianak dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik.

DISKUSI

Hasil penelitian dari kegiatan FGD "Mewujudkan Desa Mandiri: Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa" yang dilaksanakan di Hotel Pontianak mengungkapkan beberapa temuan penting yang sangat relevan untuk pemberdayaan desa. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa komunitas desa sangat antusias dan berkomitmen untuk terlibat dalam proses ini. Peserta dari beberapa perwakilan desa berbeda memberikan perspektif yang kaya dan mendalam, yang membantu mengidentifikasi berbagai lembaga kemasyarakatan desa (LKD) serta peran vital mereka dalam kehidupan desa.

Diskusi intensif yang terjadi mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dan Kelompok Tani memainkan peran yang sangat signifikan. Karang Taruna, misalnya, aktif dalam mengembangkan potensi pemuda melalui berbagai program keterampilan dan kegiatan sosial. PKK berfokus pada meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan program kesehatan dan ekonomi, sementara LPM memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kelompok Tani berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui pelatihan dan penyuluhan. Keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di desa-desa tersebut.

Lebih lanjut, hasil pemetaan mengungkapkan kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas lembaga, akses terhadap sumber daya, dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Peserta mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas, penyediaan modal usaha dan teknologi pertanian, serta peningkatan infrastruktur desa. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang terampil, kurangnya kolaborasi antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, serta kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan.

Pentingnya pendataan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) juga menjadi fokus utama dalam diskusi ini. Pendataan yang akurat dan terperinci sangat penting untuk memahami kapasitas dan potensi setiap lembaga dalam mendukung pembangunan desa. Data yang komprehensif memungkinkan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Selain itu, pendataan LKD dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan masing-masing lembaga, sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat guna dan berdampak positif jangka panjang.

Rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi ini mencakup beberapa langkah strategis, seperti penguatan kapasitas melalui pelatihan rutin, peningkatan akses ke sumber daya, dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, kolaborasi antara lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait harus ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam proses pembangunan. Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Implementasi dari rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat membantu desa-desa di sekitar Pontianak untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam inisiatif pembangunan pedesaan seperti yang dijelaskan dalam artikel ini, keterlibatan berbagai organisasi dan lembaga masyarakat memainkan peran yang sangat penting. Studi seperti yang dilakukan oleh (Panudju et al., 2021) dan (Khan, 2017) menekankan pentingnya pemberdayaan lembaga masyarakat lokal seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian oleh (Noerdin et al., 2023) menyoroti tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi lembaga masyarakat desa akibat kompleksitas demografis dan masalah administratif.

Dalam konteks mempromosikan desa mandiri, studi oleh (Sidik, 2015) menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal untuk pengembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan artikel untuk memberdayakan komunitas pedesaan melalui penilaian dan

peningkatan lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu, penelitian oleh (Al-Fatih, 2022) tentang mendidik masyarakat dalam merancang peraturan desa berdasarkan nilai-nilai religius menunjukkan pendekatan multifaset yang diperlukan untuk pembangunan pedesaan yang holistik.

Untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang efektif, karya (Ilhamdi et al., 2021) tentang penguatan lembaga kemasyarakatan di Lombok Timur memberikan wawasan tentang strategi pembangunan kapasitas yang berhasil. Selain itu, studi oleh (Tuhumury & Wance, 2020) tentang mempromosikan tata kelola yang baik dalam keuangan desa menekankan pentingnya manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel dalam mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas aspek krusial pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan, khususnya di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup di desa-desa. Melalui implementasi berbagai program dan strategi, seperti inisiatif pemberdayaan pemuda dan konservasi sumber daya alam yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, desa-desa dapat menjadi mandiri dan sejahtera. Upaya-upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan tetapi juga mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Program pemberdayaan pemuda merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat, karena berperan signifikan dalam meningkatkan efikasi diri dan harga diri di kalangan remaja. Dengan menerapkan model yang dirancang dengan baik, teori perubahan yang jelas, dan desain studi dampak yang ketat, program pemberdayaan yang berkelanjutan dapat dibangun untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan memupuk tata kelola yang baik sangat penting untuk membangun komunitas yang kuat dan tangguh melalui inisiatif pemberdayaan ekonomi. Dengan fokus pada kepemimpinan, inovasi, dan kolaborasi, desa-desa dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara efektif, menarik wisatawan, dan menciptakan peluang ekonomi bagi penduduk lokal.

Sebagai kesimpulan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas pedesaan. Dengan mengintegrasikan inisiatif pemberdayaan pemuda, mempromosikan konservasi sumber daya alam melalui kegiatan ekonomi, dan menekankan kolaborasi serta tata kelola yang baik, desa-desa dapat mencapai kemandirian dan kemakmuran. Upaya-upaya ini

tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pengelolaan lingkungan yang baik dan ketahanan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan desa-desa yang berdaya dan mandiri. Dan semua itu terlaksana atas dukungan lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa yang harus didata untuk bisa dikembangkan kedepannya.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, I., Hendratmoko, N. S., & Sutapa, H. (2019). Penyuluhan peran LPMK dalam membangun sumber daya manusia Kelurahan Sukorame Kota Kediri. *Cendekia Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v1i1.410>
- Alao, A., Lwoga, E. T., & Chigona, W. (2017). Telecentres use in rural communities and women empowerment: Case of Western Cape. 119–134. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59111-7_11
- Al-Fatih, S. (2022). Edukasi pembentukan peraturan desa berbasis nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 291–298. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23467>
- Amundsen, S., & Martinsen, O. J. (2015). Linking empowering leadership to job satisfaction, work effort, and creativity. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 22(3), 304–323. <https://doi.org/10.1177/1548051814565819>
- Estai, M., Kruger, E., & Tennant, M. (2016). Role of telemedicine and mid-level dental providers in expanding dental-care access: Potential application in rural Australia. *International Dental Journal*, 66(4), 195–200. <https://doi.org/10.1111/idj.12217>
- Ganjipour, M., Taleshi, M., & Shaterian, M. (2020). State investment and empowerment of local communities, an approach to sustainable rural development (Experience of Kashan rural area in Central Iran). *Journal of Sustainable Rural Development*, 4(2), 229–242. <https://doi.org/10.32598/jsrd.4.2.10>
- Haipon, H., & Watu, Y. D. B. (2021). Peranan badan permusyawaratan desa dalam mengawasi alokasi dana desa tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 125–133. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.4805>
- Ilhamdi, M. L., Idrus, A. Al, Santoso, D., Syukur, A., & Raksun, A. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i2.833>
- Islam, M. N., & Inan, T. T. (2021). Exploring the fundamental factors of digital inequality in Bangladesh. *Sage Open*, 11(2), 215824402110214. <https://doi.org/10.1177/21582440211021407>
- Kaiyo, A. R., & Mina, R. (2018). Pendampingan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa. *Monsu Ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.32529/tano.v1i2.249>

- Khan, I. A. (2017). Determinants of women's empowerment and poverty reduction: A case study of rural Faisalabad, Punjab. *The Pakistan Journal of Agricultural Sciences*, 54(01), 217–225. <https://doi.org/10.21162/pakjas/17.4563>
- Mahato, T., Jha, M. K., Nayak, A. K., & Kaushal, N. (2022). Empowerment of women through participation in self-help groups: A bibliometric analysis and systematic review. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 17(6), 1511–1538. <https://doi.org/10.1108/jec-08-2022-0114>
- Muhtar, M., Hamidi, N., & Susanti, A. D. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam mendorong kemajuan pemerintahan desa. *Budimas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.3903>
- Noerdin, N. Z., Libra, R. D., & Oktapani, S. (2023). Pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 48–54. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.92>
- Panudju, A. T., Nopianti, R., & Triana, L. (2021). Pemberdayaan pengrajin bambu di Kecamatan Bandung-Serang dengan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Kangmas Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 312–322. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v2i3.535>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability*, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Riyatna, K. D. D., & Gayatri, G. (2021). Faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Denpasar Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3273. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i12.p18>
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sunaryono, S., Rizaldy, R., & Zulimi, Z. (2022). Supply chain operation reference analysis for the village superior product e-commerce of BUMDes. *Logistic and Operation Management Research (LOMR)*, 1(2), 74–85.
- Sunaryono, S., Salahuddin, M., & Dilla, Z. S. (2019). Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan (studi kasus pada BUMDes di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi STIEP*, 4(2), 1–8.
- Tuhumury, Y., & Wance, M. (2020). Membangun good governance dalam pemanfaatan keuangan desa. *Indonesian Governance Journal Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1463>